

ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Mawani Nasution¹⁾, Sriwardany²⁾, Ratna Sari Dewi³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

JL.Garu II No 93

Email: mawaninst@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data penelitian terdiri dari Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak, Pembiayaan Daerah dan Belanja Modal yang berasal dari laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017, diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017 yang berjumlah 33 Kabupaten dan Kota. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui metode purposive sampling, dengan periode waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2015- 2017 sehingga berjumlah 99 sampel. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas dan autokorelasi), Uji analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis menggunakan uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pembiayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015- 2017. Dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,795.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak, Pembiayaan Daerah dan Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to determine: The Effect of General Allocation Funds, Tax Revenue Sharing and Regional Financing on Capital Expenditures in the Districts and Cities of North Sumatra Province in 2015-2017. This research is quantitative descriptive. The research data consisted of the General Allocation Fund, Tax Revenue Sharing, Regional Financing and Capital Expenditures derived from the report on the realization of district and city APBDs in North Sumatra Province in 2015-2017, obtained from the official website of the Central Statistics Agency. The population in this study were all districts and cities in North Sumatra Province in 2015-2017, amounting to 33 districts and cities. The sample selection in this study was carried out through a purposive sampling method, with a period of 3 years, namely from 2015 to 2017 so that there were 99 samples. Data collection techniques using the method of documentation. The prerequisite test for data analysis uses the classic assumption test (normality, multicollinearity and autocorrelation), multiple linear regression analysis test. Hypothesis testing uses the t test, f test and the coefficient of determination. The results showed that: General Allocation Funds, Tax Revenue Sharing and Regional Financing have a significant effect on Capital Expenditures in the Regencies and Cities in North Sumatra Province in 2015 2017. And the coefficient of determination (R^2) of 0.795.

Keywords: General Allocation Funds, Tax Sharing, Regional Financing and Capital Expenditures

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan

otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Anggaran daerah yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD ini terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Prinsip pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Dana bagi hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber daya Alam. Dana bagi hasil pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21.

Selain DAU dan Bagi Hasil Pajak dalam memenuhi kebutuhan belanja modal, pemerintah daerah juga dapat menggunakan dana Pembiayaan daerah. Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, dapat dilihat peningkatan/ penurunan dari data yang akan diteliti. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 1.1. Realisasi DAU, Bagi Hasil Pajak, Pembiayaan Daerah dan Belanja Modal Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara (000 rupiah)

Tahun	DAU	Bagi Hasil Pajak	Pembiayaan Daerah	Belanja Modal
2015	19.527.737.839	926.577.764	3.245.369.059	7.794.250.956
2016	21.408.146.712	1.236.529.098	3.234.542.452	8.735.879.218
2017	21.434.274.638	1.041.582.991	3.169.905.198	9.023.794.745

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa Belanja modal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pendapatan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak dan pembiayaan daerah. Faktanya berdasarkan table diatas Pembiayaan Daerah mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan bagi hasil pajak mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan di tahun

2017. Peningkatan pendapatan daerah tentunya akan merangsang pemerintah daerah meningkatkan investasi belanja modal sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat seiring meningkatnya pendapatan per kapita.

Pemerintah daerah seharusnya tidak bergantung dengan Dana Alokasi Umum dalam membentuk kemandirian daerahnya, jika Dana Alokasi Umum tidak ada maka perputaran roda keuangan akan sangat buruk. Pada kenyataannya pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah untuk membiayai belanja daerahnya.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public (Keefer dan Khemani 2003 dalam Putro 2010). Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting

dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran.

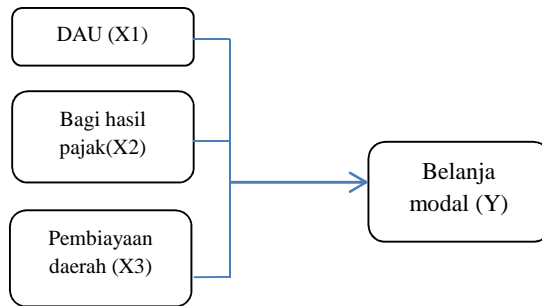
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa rasio belanja modal lebih kecil daripada rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan infrastruktur yang sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ivonerose, Theodora Revia (2017) Analisis Determinan Belanja Modal di Eks Karesidenan Surakarta yang menggunakan periode dalam kurun waktu 2011- 2015, sedangkan peneliti sekarang meneliti Analisis Determinan Belanja Modal pada kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan periode waktu 2015- 2017 dengan sampel kabupaten dan kota di provinsi Sumatera.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum, bagi hasil pajak, pembiayaan daerah terhadap belanja modal pada

kabupaten dan kota di provinsi sumatera utara.

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah



2. METODE

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis, digunakan Model Regresi Linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = belanja modal

b₀₋₁= Konstanta

X₁ = DAU

X₂ = Bagi hasil pajak

X₃ = Pembiayaan daerah

e = error

Teknik yang dilakukan dalam menyimpulkan hasil penelitian akan menggunakan SPSS.

Uji Hipotesis

- a. Koefisien Determinasi (R²) untuk menentukan apakah model regresi cukup baik

Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat pada Tabel 2.

digunakan, maka ditetapkan melalui koefisien determinasi. Nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali,2016).

- b. Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.
- c. Uji f untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama sama

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Koefisien Determinasi(R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.892 ^a	.795	.789

Sumber : Data sekunder diolah, Tahun 2019

Dari Tabel 1 menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,789 berarti 78,9 % variasi peningkatan pendapatan usaha dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu DAU, bagi hasil pajak dan pembiayaan daerah. Sisanya 21,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji-t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39748810.57	20648698.99		1.925	.057
	DAU	.171	.042	.313	4.023	.000
	Bagi Hasil Pajak	2.319	.305	.537	7.610	.000
	Pembiayaan	.367	.114	.150	3.206	.002

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Data sekunder diolah, Tahun 2019

Dari Tabel 2, menghasilkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah: Nilai signifikansi pada DAU, bagi hasil pajak dan pembiayaan daerah lebih kecil dari (0,05), maka DAU, bagi hasil pajak dan pembiayaan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Model persamaan regresi di atas sebagai berikut :

$$Y = 39748810,57 + 0,171X1 + 2,319X2 + 0,367X3$$

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression ^b	200118.18	3	66706.057	123.116	.000 ^b
	Residual	61712.17	88	701.274		
	Total	261830.35	91			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan, Bagi Hasil Pajak, DAU

F-hitung sebesar 123,116 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% (= 0,05) dan Fhitung sebesar 123,116 > F-tabel sebesar 2,70 yang artinya H4 diterima maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pembiayaan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini didukung

oleh hasil penelitian yang dilakukan Santika Adhi Karyadi (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Novira Sartika (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang didalamnya terdapat (DBH Pajak dan DBH SDA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Novira Sartika (2017) yang menyatakan bahwa APBD yang didalamnya terdapat (Pembiayaan Daerah) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4. Kesimpulan

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
2. Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
3. Pembiayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
4. Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pembiayaan Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Karyadi, Santika. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011- 2014". Skripsi. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Ardhani, Pungky. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Halim, Abdul. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- <http://www.bps.sumut.go.id>. Diakses pada 2 Februari 2019.
- Ivonerose, Theodora Revia. 2017. "Analisis Determinan Belanja Modal di EKS Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2015". Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Badan Penerbit UNDIP. Semarang
- Kemenkeu.(2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- Maryono, Yuni Puji Astutik. 2015. "Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah". Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Sartika, Novira. 2017. "Analisis Faktor factor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau". *Jurnal Ekonomi*. Vol 12, Nomor 2: 121-135. Riau: Universitas Riau
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang belanja modal
- PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)". *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli

- Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Siahaan, Lasma Melinda (2017) "Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh". Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2018 "Metode Penelitian Bisnis (oendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D)". Alfabeta. Bandung.
- Sukmawati, Suwendra dan Yudiatmaja (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng". Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
- Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No.22 Tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan Indonesia tentang Otonomi daerah
- Wandira, Arbie Gugus (2015). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2014)". Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Yovita, Farah Marta. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)". Diponegoro Jurnal Of Accounting. Semarang: UNDIP